

Tulungagung 2021: Mengendalikan Pandemi, Kunci Pemulihan Ekonomi

Oleh:
Arif Sujoko¹

Ringkasan Eksekutif

Di tengah ketiadaan data ekonomi makro, pandemi Covid-19 kemungkinan telah memasukkan Tulungagung ke dalam resesi. Skenario pesimis yang disusun Bappeda Provinsi Jawa Timur memperkirakan perekonomian Tulungagung 2020 akan mengalami kontraksi hingga minus 1,4%. Hal ini diduga disebabkan oleh penurunan konsumsi rumah tangga dari kelompok menengah-atas. Karena itu, kucuran bantuan sosial, walaupun sangat penting bagi masyarakat bawah, belum mampu memulihkan ekonomi. Konsumsi kelompok menengah-atas sulit kembali normal apabila ketidakpastian selama pandemi Covid-19 masih tinggi. Untuk mengurangi ketidakpastian ini, Pemkab Tulungagung perlu memperkecil risiko transmisi lokal dan memastikan bahwa kasus aktif akan selalu rendah sepanjang tahun 2021.

Pendahuluan

“Bahaya sebenarnya adalah ketika virus ini bermutasi dan menginfeksi sistem ekonomi, bahkan ketika virus tersebut berhasil dikeluarkan dari dalam tubuh kita”, sinyal kewaspadaan ini dinyatakan oleh Pierre-Oliver Gourinchias, guru besar ekonomi University of California Berkeley, pada pertengahan Maret 2020. Tidak sampai enam bulan kemudian, infeksi Covid-19 terhadap perekonomian telah menyebabkan resesi di banyak negara, termasuk Indonesia.

Di Kabupaten Tulungagung, pengaruh pandemi Covid-19 terhadap perekonomian daerah sulit diketahui. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya data ekonomi triwulanan 2020. Pun ketika tahun 2020 sudah berlalu, data dimaksud masih belum tersedia. Akibatnya, evaluasi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Tulungagung menjadi sulit dilakukan.

Dalam kondisi tersebut, Bappeda Provinsi Jawa Timur (2020) menyusun 2 skenario perekonomian Tulungagung, yaitu: terkontraksi minus 1,4% jika terdampak parah atau tumbuh 0,8% jika terdampak ringan. Oleh karena angka ini sama persis dengan skenario untuk Jawa Timur, maka analisis dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Tulungagung cukup relevan apabila didekati dengan analisis dampak yang sama di tingkat Jawa Timur.

Policy brief ini disusun dengan tujuan memaparkan kondisi perekonomian saat ini, menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi perekonomian khususnya berkaitan dengan pandemi Covid-19, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan di tahun 2021.

Infeksi Covid-19 pada Perekonomian Jawa Timur 2020

Pada awal pandemi, pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian yang ketat untuk melandaikan kurva pandemi. Namun, kebijakan tersebut mengakibatkan penurunan ekonomi.

¹ Analis Kebijakan Ahli Pertama

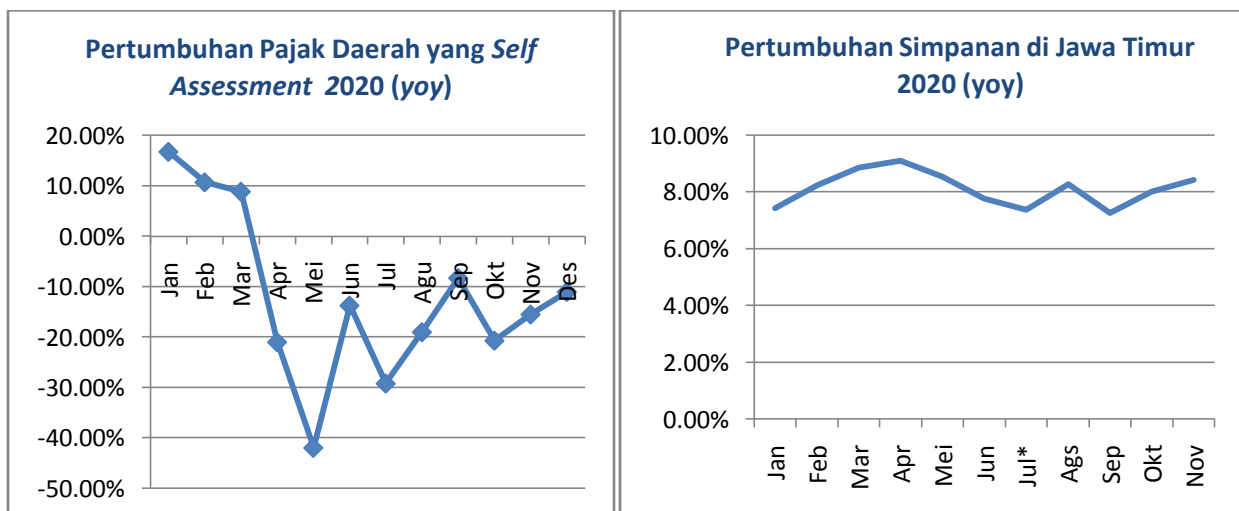
Data BPS menunjukkan bahwa ekonomi Jawa Timur terperosok hingga minus 5,90% (*year on year/ yoy*) pada triwulan II 2020.

Memasuki triwulan III, kebijakan pengendalian Covid-19 mulai diperlunak. Pembatasan sosial sudah dilonggarkan, berbagai sektor usaha kembali beroperasi. Hasilnya, walaupun masih tetap tumbuh negatif, perekonomian mulai sedikit membaik. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi s.d. triwulan III 2020, diperkirakan perekonomian Jawa Timur 2020 akan lebih mendekati angka prediksi minus 1,14%.

Kondisi di atas sejatinya menunjukkan bahwa pembukaan kembali berbagai sektor usaha, masih belum mampu memulihkan ekonomi. Bahkan, BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tulungagung pada Agustus 2020 mencapai 4,61%, tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Sulitnya pemulihan ekonomi ini karena pandemi Covid-19 tidak hanya menurunkan produksi, tetapi juga konsumsi (Stiglitz, 2020a). Konsekuensinya, tanpa perbaikan di sisi konsumsi, penambahan produksi hanya akan menciptakan kerugian bagi pelakunya.

Sebenarnya, pemerintah sudah berupaya membenahi sisi konsumsi melalui pemberian bansos. Tetapi, tujuan bansos memang sebatas untuk menjaga daya beli. Apalagi jangkauan bansos hanya untuk kelompok 40% terbawah yang kontribusinya tidak lebih dari 20% total konsumsi masyarakat. Sementara itu, konsumsi kelompok menengah-atas yang berkontribusi sekitar 80% dari total konsumsi masyarakat, relatif masih terbatas intervensinya.

Akibatnya, konsumsi kelompok menengah-atas belum pulih. Rendahnya konsumsi kelompok ini bukan karena tidak adanya pendapatan, tetapi kelompok ini memilih untuk mengurangi konsumsi sekaligus meningkatkan tabungan, sebagai bentuk antisipasi ketidakpastian dan kekhawatiran terpapar Covid-19 (Kompas.id, 4 Oktober 2020).



Diolah dari data Pemkab Tulungagung dan SEKDA BI

Kontraksi pada pajak daerah mengindikasikan guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Tulungagung. Pemulihan ekonomi akan semakin sulit dilakukan ketika masyarakat lebih memilih mengamankan pendapatannya dalam tabungan dibanding meningkatkan konsumsi

Dalam masa pandemi, Stiglitz (2020b) menjelaskan bahwa ketidakpastian bukan hanya menyangkut seberapa parah dan seberapa lama pandemi ini terjadi, tetapi juga dampak ekonomi yang diakibatkannya. Termasuk kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengendalikan pandemi dan ekonomi. Oleh karena itu, konsumsi tidak akan meningkat selama ketidakpastian ini masih relatif tinggi.

Ketidakpastian akan berlanjutnya persebaran Covid-19, misalnya, membuat masyarakat khawatir akan kesehatan dan nyawa mereka. Demikian juga ketidakpastian akan pekerjaan, membuat masyarakat berhati-hati dengan belanja. Para usahawanpun tidak mungkin membuat rencana bisnis yang handal dalam ketidakpastian yang tinggi karena pandemi ini. Oleh karena itu, ketidakpastian merupakan racun pemulihan ekonomi, sehingga prioritas penanganan yang diambil terlebih dahulu adalah menghilangkan ketidakpastian secepat mungkin. (Smit *et al.*, 2020)

Prediksi 2021

“*Penyakit seseorang yang dirudung malang ialah, bahwa ia sangat ingin senang secara mendadak*”. Pernyataan Andi Hakim Nasoetion (1968), guru besar statistika IPB, ini mungkin mencerminkan kondisi sekarang. Dalam kejenuhan karena pandemi, datangnya informasi tentang vaksin oleh sebagian masyarakat dianggap bahwa pandemi akan segera selesai, mungkin 1 atau 2 bulan lagi. Padahal, walaupun vaksin sudah tersedia, belum ada yang memastikan kapan pandemi akan berakhir di Indonesia.

Di Amerika Serikat, dengan asumsi *Emergency Use Authorization* (EUA) diterbitkan pada Desember 2020/Januari 2021, persetujuan penuh *Biologic License Application* (BLA) pada Maret/April 2021, dan diperkirakan 6 bulan diperlukan untuk proses produksi, distribusi, dan pelaksanaan vaksinasi yang cukup untuk mewujudkan *herd immunity*, Charumilind *et al.* (2020) memperkirakan akhir pandemi akan terjadi pada triwulan ke III atau IV 2021.

Untuk Indonesia yang diperkirakan proses-proses tersebut berjalan lebih lambat dibanding di Amerika Serikat, *herd immunity* sebagai akhir dari pandemi sangat mungkin baru terwujud di akhir 2022. Artinya, tahun 2021, masih menjadi tahun pandemi. Oleh karena itu, pemulihan ekonomi di tahun ini tergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengurangi ketidakpastian. Ekonomi akan kembali normal ketika pelaku ekonomi yakin kalau situasi sudah aman, bukan ketika mereka hanya berharap situasi telah aman (Smit *et al.*, 2020).

Alternatif Kebijakan

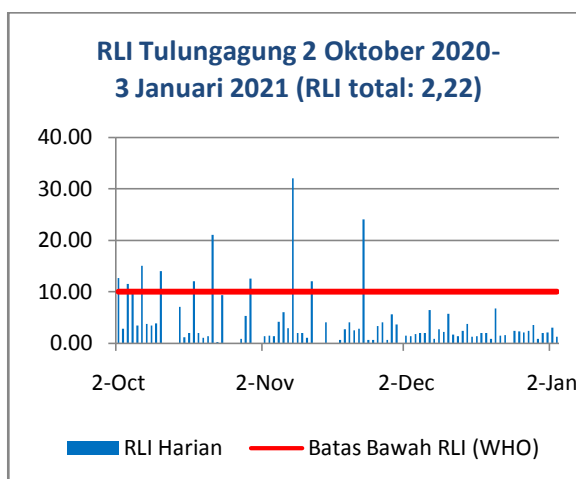
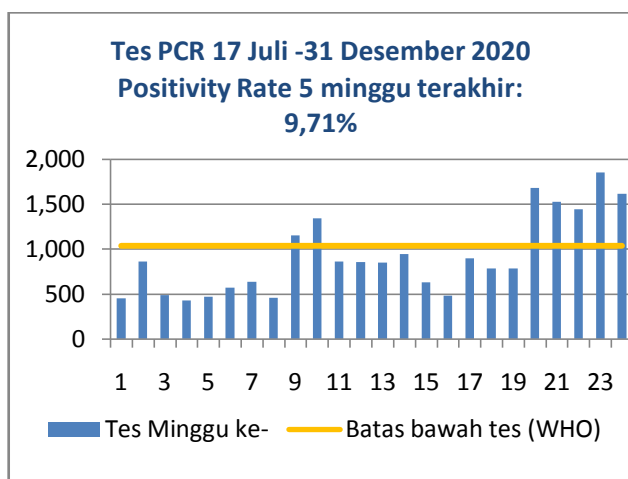
Ketidakpastian memang tidak dapat dihilangkan, tetapi dalam batas tertentu derajatnya dapat diperkecil. Dalam konteks pandemi, terdapat 3 alternatif untuk mengurangi ketidakpastian, yaitu:

Alternatif pertama. Alternatif ini adalah cara terbaik untuk memperkecil ketidakpastian, yaitu menjaga kasus mendekati nol, baik dengan mencegah masuknya pengidap Covid-19 dari luar daerah, maupun mencegah terjadinya transmisi lokal. Pueyo (2020) menjelaskan bahwa pencegahan kasus dari luar daerah bisa dilakukan dengan membuat larangan masuknya orang dari daerah lain, pemberlakuan karantina bagi pendatang, atau menerapkan *check point* untuk penilaian kesehatan. Sementara itu, untuk mencegah transmisi lokal dilaksanakan 3T (*testing, tracing, dan treatment*) dan lacak-isolasi secara intensif. Contoh terbaik dalam menerapkan alternatif ini adalah Taiwan. Taiwan bukan hanya berhasil mengendalikan pandemi, tetapi juga menumbuhkan ekonomi melalui peningkatan ekspor dan konsumsi domestik (Deng, 2020).

Alternatif kedua. Alternatif ini dilakukan apabila pencegahan masuknya kasus dari luar daerah tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, fokus utama adalah mengurangi transmisi lokal

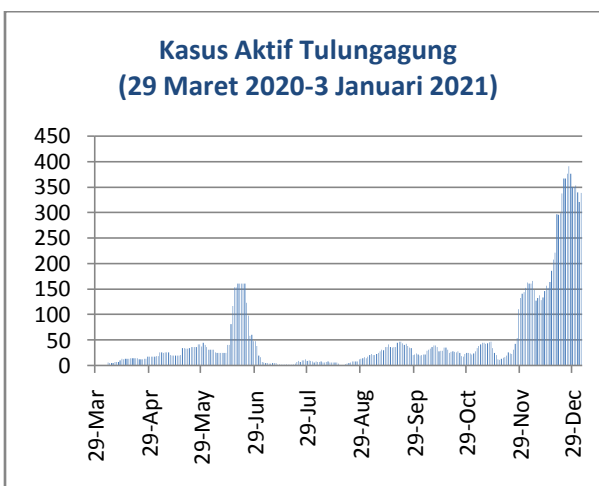
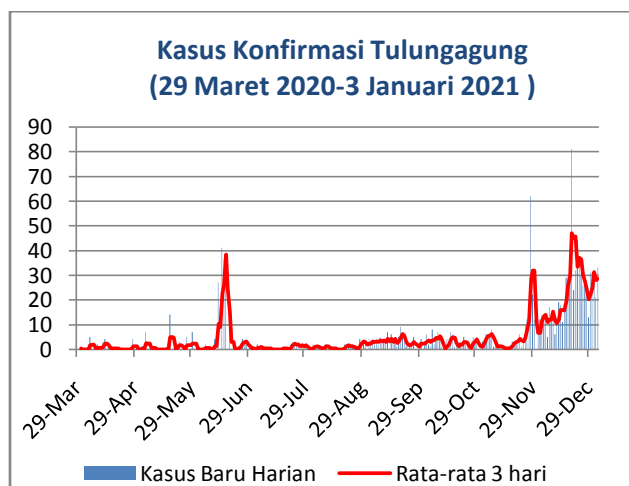
dan menjaga kasus aktif selalu berada pada tingkat aman, dimana sistem kesehatan bisa memberikan layanan terbaiknya. Pengurangan transmisi lokal bisa dilakukan melalui *testing* secara masif, upaya lacak isolasi, dan disiplin 3M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak). WHO (2020) menetapkan batas minimal tes 1 orang per 1.000 penduduk perminggu dan meningkatkannya hingga *positivity rate* dalam 2 minggu terakhir <5%. Sedangkan untuk rasio lacak isolasi (RLI), WHO merekomendasikan pelacakan 10-30 kontak erat, setiap penegakan 1 kasus konfirmasi (Wicaksono dan Bessie, 2020). Untuk menjaga kasus aktif tetap dalam batas aman dilakukan dengan pembatasan sosial secara parsial sesuai kriteria yang ditetapkan.

Alternatif ketiga. Alternatif ini adalah *status quo*, dimana secara umum, pelaksanaan testing dan lacak isolasi masih di bawah standar. Demikian juga dengan disiplin 3M yang masih terjadi banyak pelanggaran. Kebijakan *status quo* ini telah menghasilkan beberapa lonjakan kasus baru, maupun kasus aktif sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian yang tinggi.



Diolah dari <http://dinkestulungagung.net> dan <http://infocovid19.jatimprov.go.id>.

Rendahnya *testing*, rasio lacak-isolasi, dan pelanggaran 3M dapat meningkatkan risiko penularan Covid-19. Lima minggu terakhir jumlah tes memang di atas standar minimal WHO, tetapi *positivity rate* masih >5%, sehingga jumlah tes masih harus ditingkatkan



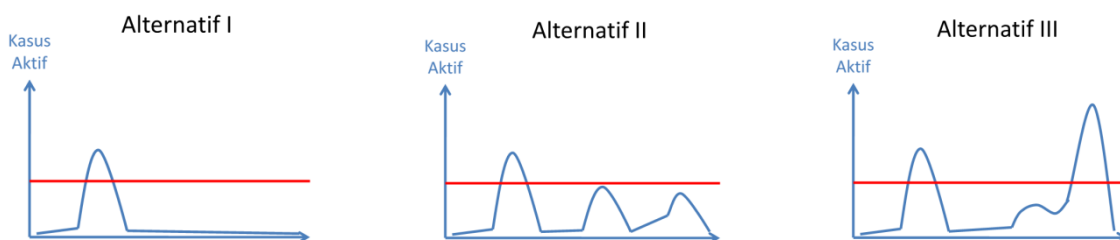
Diolah dari <http://infocovid19.jatimprov.go.id>

Dalam kondisi *testing* dan lacak isolasi yang belum optimal, risiko jumlah kasus sebenarnya bisa lebih tinggi dari grafik ini. Interpretasi serupa juga perlu dilakukan pada jumlah kematian.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pandemi Covid-19 diperkirakan akan menyebabkan perekonomian Tulungagung berkontraksi minus 1,4% pada tahun 2020. Penyebab utama pelemahan ekonomi ini adalah penurunan konsumsi kelompok menengah-atas, akibat ketidakpastian selama masa pandemi.

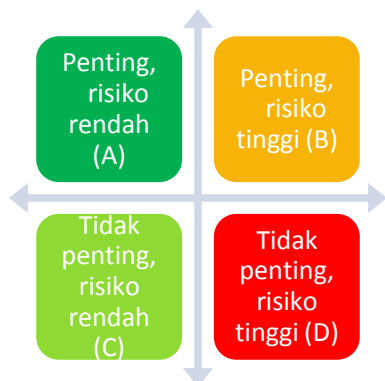
Oleh karena itu, untuk memulihkan perekonomian di 2021, Pemkab Tulungagung direkomendasikan untuk mengurangi ketidakpastian dengan melaksanakan alternatif kedua, yaitu kebijakan memperkecil risiko transmisi lokal dan menjaga agar kasus aktif relatif rendah sepanjang tahun.



Ketika alternatif I tidak bisa dilaksanakan, alternatif II lebih memberikan kepastian dibanding alternatif III. Garis merah adalah batas sistem kesehatan dapat memberikan layanan terbaiknya. Batas tersebut ditentukan oleh sumber daya yang paling sedikit, bukan paling banyak. Mungkin fasilitas kesehatan tersedia, tetapi kelelahan nakes karena beban kerja berlebih, bisa menjadi titik kritis sistem kesehatan.

Alternatif kedua ini dilakukan melalui tindakan:

- Pengujian secara masif sesuai standar WHO.
- Pelacakan dan isolasi kontak erat sesuai standar WHO, segera tanpa penundaan.
- Penerapan protokol kesehatan dan penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan.
- Pernyataan tegas bahwa selama tahun 2021, Pemkab Tulungagung akan menjaga kasus aktif tidak melebihi batas tertentu (zona aman), dimana pada zona ini semua kegiatan sosial/ekonomi/keagamaan bisa dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.
- Penyusunan pedoman yang memberikan kepastian jenis-jenis kegiatan yang boleh dilaksanakan pada kondisi aman/cukup aman/kurang aman/tidak aman.



Kapasitas Sistem Kesehatan	Kegiatan yang diperbolehkan beroperasi
Aman	A, B, C, D
Cukup Aman	A,B,C
Kurang Aman	A,C
Tidak Aman	A

Pemetaan setiap kegiatan ke dalam kuadran berdasarkan tingkat kepentingan bagi kehidupan masyarakat dan risiko penularan Covid-19 yang dilakukan berbasis bukti bisa memberikan kepastian operasional dalam berbagai kondisi. Risiko persebaran tinggi terjadi ketika kegiatan dilakukan dalam waktu lama, di ruangan tertutup, jarak yang rapat, dan banyak aktivitas membuka suara.

- Pemberian bantuan sosial bagi pelaku usaha kecil yang ditutup karena peningkatan kasus.
- Penyampaian informasi kepada masyarakat tentang semua tindakan pemerintah, beserta target, dan hasilnya. Penjelasan secara utuh dan transparan tidak akan membuat masyarakat takut, namun akan mendorong masyarakat menyadari keparahan wabah sehingga bersedia mendisiplinkan diri mengikuti ketentuan untuk mencegah penularan (CISDI, 2020).

“Karena kita tidak dapat memulihkan ekonomi hingga pandemi bisa dikendalikan, kesehatan harus menjadi prioritas pertama”
(Joseph E. Stiglitz, pemenang Nobel Ekonomi 2001)

Referensi

- Bappeda Provinsi Jawa Timur. (2020). *Kebijakan Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19*. Materi disampaikan dalam Seminar Kondisi Ekonomi Kota Probolinggo di Masa Pandemi Covid-19, tanggal 1 Desember 2020.
- Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives. (2020). *Health Outlook 2021: Covid 19: Disrupsi pada Layanan Kesehatan Esensial, Dampak yang Ditimbulkan, dan Jalan Membangun Kembali Sektor Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives.
- Charumilind, S., M. Craven, J. Lamb, A. Sabow, M. Wilson. 2020. *When Will Covid-19 Pandemic End?*. Diakses dari <https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/when-will-the-covid-19-pandemic-end> pada 8 Desember 2020 jam 14.01.
- Deng, C. (2020). *Taiwan Shrugs off Pandemic to Deliver Surprise Growth*. <https://www.wsj.com/articles/taiwan-shrugs-off-pandemic-to-deliver-surprise-growth-11604063439>, diakses 22 Desember 2020, jam 9.22.
- Gourinchias, P. O. (2020). *Flattening the Pandemic and Recession Curves*. https://clausen.berkeley.edu/wp-content/uploads/2020/03/COVID_2b.pdf, diakses 16 April 2020, jam 14.01.
- Pueyo, T. (2020). *To Beat the Coronavirus, Build a Better Fence*. <https://www.nytimes.com/interactive/2020/09/14/opinion/politics/coronavirus-close-borders-travel-quarantine.html>, diakses 16 Desember 2020, jam 14.33.
- Kompas.id. (4 Oktober 2020). *Ciptakan Rasa Aman untuk Dorong Belanja Masyarakat*. <https://kompas.id/baca/ekonomi/2020/10/04/ciptakan-rasa-aman-untuk-dorong-belanja-masyarakat/>, diakses 4 Desember 2020 jam 10.41.
- Nasoetion, A. H. (1968). *Padi Ajaib dan Rencana Pembangunan Lima Tahun*. Dalam Redaksi Ekonomi Harian Kompas (1982). *Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia Perkembangan Pemikiran 1965-1981*. Jakarta: Gramedia.
- Smit, S., M. Hirt, P. Dash, A. Lucas, T. Latkovic, M. Wilson, E. Greenberg, K. Buehler, dan K. Hjartar. (2020). *Crushing Corona Virus Uncertainty: The Big 'Unlock' for Our Economies*. Diakses dari <https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/crushing-coronavirus-uncertainty-the-big-unlock-for-our-economies>, tanggal 20 Desember 2020, jam. 8.52.
- Stiglitz, J. (2020a). *The Economy of Tomorrow: Recovering and Restructuring After Covid-19*. *Issue Brief Roosevelt Institute*, Oktober 2020.
- Stiglitz, J. (2020b). *The Pandemic Economics Crisis, Precautionary Behavior, And Mobility Constraint: An Application of The Dynamic Disequilibrium Model With Randomness*. *NBER Working Paper No. 27992*, Oktober 2020
- Wicaksono, S. dan R. Bessie. (2020). *Rendahnya Pelacakan Kontak dan Tingginya Tingkat Positivitas Tes: Latar Belakang dan Prospek PSBB II DKI Jakarta*. <https://kawalCovid19.id/content/1466/rendahnya-pelacakan-kontak-dan-tingginya-tingkat-positivitas-tes-latar-belakang-dan-prospek-psbb-ii-dki-jakarta>, diakses 14 Desember 2020 jam 8.35.
- World Health Organization. (2020). *Public Health Criteria to Adjust Public Health and Social Measures in Context of Covid-19*. *Annex to Considerations in Adjusting Public Health and Social Measures in The Context of Covid-19*, 12 Mei 2020.

Policy brief ini adalah hasil dari kajian kebijakan di Bappeda Kabupaten Tulungagung. Sebagai bentuk dukungan dalam perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*), ulasan di dalamnya merupakan pandangan pribadi penulis, bukan mewakili pendapat resmi Bappeda Kabupaten Tulungagung.